



EKSISTENSI GERAKAN IDEOLOGI TRANSNASIONAL HTI SEBELUM DAN SESUDAH PEMBUBARAN

Abdul Qohar

UIN Raden Intan Lampung
Abdul.qohar@radenintan.ac.id

Kiki Muhamad Hakiki

UIN Raden Intan Lampung
Kiki.hakiki@radenintan.ac.id

Abstract

This article attempts to explore the local development of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), especially in Lampung. The research focuses on the networks of HTI's recruitment to maintain its identity. It also alludes how the existence of HTI withstands with its dissolution in the era of President Joko Widodo. The research concludes: Firstly, there are systematically some procedures to contend the politics of identity and HTI's recruitment such as organizing the demonstrations, striving seminar and public discussion, media networks, approaching to the prominent figures and educational institutions, interpersonal recruitment, and halaqah (personal indoctrination). Secondly, there two possibilities of post-dissolution of HTI that would be executed, 1. The formation of new mass organization as the alternate of HTI. 2. To be new party or proceed to join the Islamic Party. They may search the parties that are ideologically identical or similiar to HTI's ideology like PKS, PPP, PAN, PBB. This would be happened if they fail to scramble and to maintain its ideology in the form of new mass organization.

Keywords: Social Movement, Ideology, Transnational, HTI.

Abstrak

Artikel ini membahas perkembangan HTI di Lampung. kajian ini fokus pada jaringan kerja HTI yang berkaitan dengan model atau upaya rekrutmen yang dilakukan oleh HTI dalam rangka mempertahankan identitasnya. Penelitian ini juga menganalisis eksistensi HTI pasca pembubaran oleh rezim Presiden Joko Widodo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, ada beberapa cara perjuangan politik identitas dan upaya rekrutmen yang dilakukan oleh HTI, yakni; melalui demonstrasi, menyelenggarakan seminar dan diskusi publik, publikasi melalui media, pendekatan pada tokoh dan lembaga pendidikan, rekrutmen melalui ikatan interpersonal, halaqah sebagai proses indoktrinasi. Kedua, Pasca HTI di pembubaran, kemungkinan ada dua langkah yang akan dilakukan oleh HTI; 1). Pembentukan ormas baru sebagai pengganti HTI; 2). Menjadi partai baru atau beralih haluan berpindah dan bergabung kepada partai berbasis Islam yang sudah ada. Mereka akan mencari partai-partai yang secara ideologi sama atau mirip dengan ideologi HTI sebelumnya, seperti PKS, PPP, PAN dan PBB. Kondisi ini akan terjadi jika mereka gagal memperjuangkan dan mempertahankan ideologinya dalam bentuk ormas.

Kata Kunci: Gerakan, Ideologi, Transnasional, HTI.

A. Pendahuluan

Dibandingkan dengan beberapa gerakan Islam transnasional¹ yang ada di Indonesia, HTI bisa dikatakan sebagai gerakan yang cepat tumbuh berkembang dan sangat jelas menunjukkan watak transnasionalnya serta menunjukkan perkembangan signifikan secara kuantitas. Gerakan yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani ini termasuk dalam kelompok fundamentalisme Islam.² Dalam sejarahnya gerakan ini pernah memiliki cabang lebih dari 40

¹ Gerakan Islam transnasional dapat dimaknai sebagai gerakan yang tidak hanya terbatas pada wilayah nasional atau lokal seperti halnya organisasi Islam mainstream seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), namun bentuk utama organisasi dan aktifitasnya jauh melampaui sekat-sekat teritorial wilayah Negara bangsa (*nation-state*). Lihat Peter Mandaville, *Global Political Islam* (London: Routledge, 2007), h. 279. .

² Lihat lebih lanjut dalam James Barr, *Fundamentalism* (London: SCM Press, 1981); Lihat juga Fauzan, "Fundamentalisme Dalam Islam," *Al-Adyan* Vol. V, no. 1 (June 2010): 47–60.

negara dan berkembang cukup pesat di Negara-negara demokratis, seperti Indonesia. Perkembangan HTI yang pesat ditambah dengan aktifnya dalam gerakan politik akhir-akhir ini, maka pada masa rezim Presiden Jokowi nampaknya mendapatkan perhatian khusus dan dianggap berbahaya yang kemudian berakhir dengan pembubaran secara paksa dengan alasan membahayakan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila.

Tulisan ini mengkaji secara kualitatif perkembangan HTI di tingkat lokal, yaitu di Lampung. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini difokuskan pada jaringan kerja HTI terkait dengan model atau upaya rekrutmen yang dilakukan dalam rangka mempertahankan identitasnya, baik sebelum maupun sesudah pembubaran oleh rezim Presiden Jokowi. Perkembangan HTI di Lampung tersebut didekati secara interdisipliner berdasarkan riset literatur, *indepthinterview* (wawancara mendalam) dan observasi langsung. Riset literatur dalam studi ini diarahkan kepada karya akademis tentang HTI dan publikasi HTI sendiri.

Data utama dalam riset ini dikumpulkan dari wawancara, observasi dan publikasi HTI. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali motivasi dan proses partisipasi anggota-anggota HTI, pandangan mereka tentang Islam, realitas sosial, serta pengalaman dan perasaan individu sebelum dan sesudah bergabung di HTI. Untuk menggali informasi seputar sejarah dan perkembangan HTI di Lampung, peneliti mewawancarai Humas DPD I HTI Lampung. Sementara untuk data rekrutmen dan indoktrinasi, penulis lebih banyak menggali informasi dari hasil wawancara dengan para anggota HTI (*rank-and-file*) ditambah observasi terhadap publikasi dan media HTI. Dalam riset ini, peneliti juga menggunakan metode etnografis dengan memandang informan (anggota HTI) sebagai subjek yang berbicara tentang diri mereka serta realitas disekelilingnya dengan perspektif mereka sendiri. Dengan demikian kita dapat memahami bagaimana mereka mengekspresikan keyakinan dan identitas mereka

dengan menggali *world view*, perasaan dan pengalaman mereka.³ Hasil wawancara dengan *hizbiyyin* kemudian di-*cross-check* dengan isi teks-teks HTI serta dicari persamaannya dengan jawaban dari anggota lainnya. Data ini kemudian dianalisis dengan menggunakan teori fundamentalisme dan gerakan keagamaan baru.

B. Kajian Teori

Lorne L. Dawson berpendapat bahwa modus atau mekanisme rekrutmen sekte-sekte agama di Barat adalah dengan memanfaatkan “jaringan sosial yang sudah ada dan ikatan interpersonal.”⁴ Tidak hanya itu, pola-pola yang digunakan adalah “kawan merekrut kawan, anggota keluarga merekrut anggota keluarga lainnya, dan tetangga merekrut tetangga.”⁵ John Lofland dan Rodney Stark ketika meneliti tentang pengikut *Sun Myung Moon* (the Moonies) menemukan bahwa konversi ke sekte Kristen ini sebagian besar ditentukan oleh ikatan afektif antara aktivis sekte dan calon anggota.⁶ Lofland dan Stark menunjukkan bahwa masuknya orang-orang ke sekte agama tidak semata-mata didorong oleh daya tarik ideologi, namun karena mereka melihat kawan dan keluarganya berada di kelompok tersebut. Meskipun beberapa calon anggota masih ragu dengan sebuah kelompok agama atau sekte, tetapi ikatan mereka dengan kawan barunya disana membuat mereka menerima ide-ide gerakan tersebut.

Teori di atas bisa dijadikan pisau analisa untuk melihat bagaimana eksistensi gerakan HTI, dan motivasi-motivasi orang Indonesia masuk dalam gerakan organisasi HTI tersebut.

³ Martyn Hammersley dan Paul Atkinson, *Ethnography: Principles in Practice* (London dan New York: Routledge, 2007), h. 3.

⁴ Lorne L. Dawson, *Who Joins New Religious Movements and Why: Twenty Years of Research and What Have We Learned?* Lorne L. Dawson (ed), *Cults and New Religious Movements: A Reader* (USA, UK and Australia: Blackwell Publishing, 2003), h. 119.

⁵ Lorne L. Dawson.

⁶ John Lofland and Rodney Stark, “Becoming a World-Saver: a Theory of Conversion to a Deviant Perspective,” *American Sociological Review* 30:6 (Desember 1965), h. 871-872.

C. Sejarah Hizbut Tahrir (HT) di Indonesia

Hizbut Tahrir (selanjutnya di tulis HT) adalah sebuah organisasi politik⁷ yang didirikan di kota Jerusalem Timur pada tahun 1953 oleh seorang aktivis pergerakan bernama Taqiyuddin al-Nabhani (1909-1977), beliau juga dikenal sebagai seorang pakar hukum Islam. Karier pendidikannya ditempuh dengan belajar hukum Islam di Universitas Al-Azhar Kairo. Setelah tamat dari Universitas al-Azhar, ia pun kembali ke tanah airnya dan bekerja sebagai guru di Madrasah, kepala juru tulis, lalu menjadi hakim di pengadilan agama di Palestina.⁸ Menurut informasi, selama ia di Mesir ia aktif dan menjadi simpatisan, jika bukan anggota, dari Ikhwanul Muslimin (IM), gerakan Islamis di Mesir yang didirikan tahun 1928.

Masuknya HT ke Indonesia, pada awalnya merupakan bentuk pertukaran ide yang tidak disengaja dengan komunitas HT asal Timur Tengah di Australia pada awal 1980-an. Kontak pertukaran ide itu antara Abdurrahman al-Baghdadi dan Mama Abdullah bin Nuh. Saat itu al-Baghdadi adalah seorang aktivis HT asal Libanon yang migrasi ke Australia di awal 1960-an karena menghindari persekusi di negaranya. Sedangkan Abdullah bin Nuh, adalah seorang ulama dan pimpinan pesantren al-Ghazali di Bogor, Jawa Barat. Ia juga dikenal sebagai seorang penceramah kondang dan seorang sarjana Muslim dengan keahlian dalam bidang sastra Arab yang mengajar di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia (UI).

Pasca pertemuan tersebut, Abdullah bin Nuh meminta kepada al-Baghdadi untuk membantunya mengembangkan pesantrennya. Dan sejak itulah al-Baghdadi mulai menyebarkan ide-ide HT di Indonesia. Bahkan aktivitas al-Baghdadi tidak hanya di pesantren al-Ghazali milik Abdullah bin Nuh saja, ia pun berkeliling berdakwah, bahkan ia masuk

⁷ Dengan tegas Hizbut Tahrir menyatakan dirinya sebagai kelompok politik, bukan kelompok sosial, intelektual maupun spritual. Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis* (Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), h. 1.

⁸ Suha Taji-Farouki, *A Fundamental Quest: Hizb al-Tahrir and the Search for the Islamic Caliphate* (London: Grey Seal, 1996), h. 1-2. Atau lihat juga. International Crisis Group, "Radical Islam in Central Asia: Responding to the Threat of Hizbut Tahrir," *ICG Asia Report* 58 (Juni 2003), h. 2.

ke dunia kampus. Ia berinteraksi dengan aktivis mahasiswa Muslim di masjid kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Kepada kalangan mahasiswa ia memperkenalkan ide-ide HT. Ketika banyak mahasiswa mulai tertarik dengan dakwahnya, al-Baghdadi dan bin Nuh mulai mengorganisir rekrutmen dan pendidikan sistematis melalui training dan halaqah.⁹

Pada tahapan selanjutnya, al-Baghdadi menjadikan masjid kampus IPB menjadi basis rekrutmen HTI pada awal perkembangannya. Dari sinilah kemudian gagasan HTI disebar ke kampus-kampus umum di wilayah Jawa dan Jakarta, dan kemudian menyebar melalui jaringan mahasiswa LDK ke kampus-kampus wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra. Namun demikian pada awal dakwahnya, dua tokoh ulama ini tidak menamai gerakannya sebagai gerakan dakwah HT. Hal ini dilakukan demi untuk menghindari kecurigaan negara terhadap ekspresi Islam politik di awal Orde Baru (ORBA). Gerakan dakwah tersebut bergerak secara sembunyi-sembunyi. Untuk menghindari kecurigaan dari pihak pemerintah, maka disetiap acara dakwah, publikasi dan training mereka, identitas HT selalu disembunyikan. Meskipun begitu, mereka tetapi aktif menyebarkan ide tentang perlunya menerapkan syariah dan menegakkan khilafah sebagai panji dasar gerakan HT di Indonesia.¹⁰ Menurut Ismail Yusanto (juru bicara HT), pemerintah waktu itu tidak pernah berhasil mengungkap eksistensi HT di Indonesia sebab anggota-anggotanya senantiasa bersikap *low profile* di masyarakat.¹¹

Pada masa rezim Soeharto, perhatian gerakan dakwah HTI hanya difokuskan pada pembinaan anggota atau kaderisasi melalui *halaqah* dan ekspansi jaringan mereka ke aktivis-aktivis mahasiswa Muslim di berbagai kampus di Indonesia. Pada fase ini ini bisa dikatakan bahwa HTI berada pada tahap *tatsqif* (pembinaan) dari

⁹ Greg Fealy, *Hizbut Tahrir in Indonesia: Seeking a "Total" Islamic Identity*, h. 155.

¹⁰ Greg Fealy.

¹¹ Jamhari et.al., *Menuju Khilafah Islamiyah: Gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia*, ed. oleh Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 174.

ketiga tahapan dakwah HT sebagaimana yang disebutkan di atas. HTI bekerja sebagai organisasi bawah tanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Nuh sampai akhir hayatnya di tahun 1987, lalu digantikan oleh Muhammad al-Khatthath, dan selanjutnya oleh Hafiz Abdurrahman. Hal ini sesuai dengan teori Lorne L. Dawson yang menyatakan dalam sebuah penelitiannya bahwa modus atau mekanisme rekrutmen sekte-sekte agama atau kelompok agama sebagaimana yang terjadi di Barat adalah dengan memanfaatkan “jaringan sosial yang sudah ada dan ikatan interpersonal.”¹² Pola-pola yang digunakan adalah “kawan merekrut kawan, anggota keluarga merekrut anggota keluarga lainnya, dan tetangga merekrut tetangga.”¹³

Sejak awal perkembangannya, HTI serta gerakan Islam lainnya dibangun lewat kaderisasi LDK. HTI menggunakan jaringan LDK sebagai channel rekrutmen. Bahkan, menurut Collins, ide pendirian LDK digagas oleh para pimpinan HTI.¹⁴ Sebuah LDK di IPB Bogor, *Badan Kerohanian Islam Mahasiswa* (BKIM), menjadi lembaga penting bagi rekrutmen awal dan penyebaran ide-ide HT. Para aktivis BKIM intens menghadiri ceramah publik yang disampaikan oleh Abdullah bin Nuh dan kemudian bergabung di Pondok Pesantren al-Ghazali untuk belajar dari Abdullah bin Nuh dan al-Baghdadi.¹⁵ Setelah mendominasi LDK di Bogor, aktivis-aktivis HTI kemudian menyebarkan sayap mereka dengan merekrut anggota baru di luar Bogor melalui jaringan LDK, seperti LDK di Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung, IKIP Malang, Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.¹⁶

¹² Lorne L. Dawson, *Who Joins New Religious Movements and Why: Twenty Years of Research and What Have We Learned?*, h. 119.

¹³ Lorne L. Dawson.

¹⁴ Elizabeth Fuller Collins, “Dakwah and Democracy: The Significance of Partai Keadilan and Hizbut Tahrir,” *makalah dipresentasikan pada seminar internasional tentang Islamic Militant Movements in Southeast Asia*, 22 Juli 2003, h. 9.

¹⁵ Elizabeth Fuller Collins.

¹⁶ Dwi Hardianto, “Hizbut Tahrir Indonesia: Dakwah Masjid Yang Menggurita,” *Sabili*, 2003, 9:11 edition.

Semenjak tahun 1994, HTI kemudian memulai aktivitas dakwahnya ke publik meski belum berani memakai nama HT. Dalam hal ini, HTI mulai menciptakan “organisasi-organisasi dan aktivitas-aktivitas yang terselubung (*undercover*) seperti seminar, *halaqah* mingguan, dan penerbitan buku, majalah¹⁷ dan pamflet”.¹⁸ Meskipun begitu, semua aktivitas HTI pada periode Orba masih terbatas kepada taraf diseminasi ide dan rekrutmen, tanpa sampai bergerak lebih jauh ke aksi mobilisasi di jalanan seperti yang biasa HTI lakukan.

Pasca lengsernya rezim Orde Baru di bawah presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 membuka asa jalan bagi pergerakan HT dikemudian hari. Ekspresi kegembiraan itu ternyata tidak hanya dirasakan oleh HT saja, juga dirasakan oleh organisasi atau aktivis pergerakan politik lainnya. Fase kebebasan berekspresi telah menyediakan kesempatan bagi Islam politik untuk berekspresi. Hal ini ditunjukkan dengan menjamurnya partai Islam serta munculnya sejumlah kelompok Islam dan gerakan Islam radikal. Inilah yang menurut Bahtiar Effendy, kemunculan gerakan-gerakan Islam bukanlah respon langsung terhadap demokrasi yang baru di Indonesia tetapi sebagai reaksi terhadap situasi sosial-religius dan politik pada masa transisi, yang bagi gerakan-gerakan ini tidak mencerminkan aspirasi Muslim.¹⁹

Pada bulan Mei tahun 2000, HTI mulai berani secara terbuka muncul ke ruang publik dengan menyelenggarakan konferensi internasional tentang khilafah di lapangan tennis *indoor*, Stadion Senayan Jakarta. Ini adalah aktivitas publik pertama HTI yang diadakan dengan memakai identitas HT. Lewat forum ini, HT dengan terbuka memperkenalkan ide-ide, program, dan para unsur pimpinan HTI.²⁰ Konferensi ini dihadiri oleh sekitar 5000 simpatisan HT dan menarik

¹⁷ Publikasi buletin mingguan *Al-Islam* dan majalah *Al-Wa'ie*.

¹⁸ Agus Salim, *The Rise of Hizbut Tahrir Indonesia (1982-2004): Its Political Opportunity Structure, Resource Mobilization, and Collective Action Frames* (Jakarta: Syarif Hidayatullah State Islamic University, 2005), h. 137-142.

¹⁹ Bahtiar Effendy, *Islam and the State in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2003), h. 217-218.

²⁰ Agus Salim, *The Rise of Hizbut Tahrir Indonesia (1982-2004): Its Political Opportunity Structure, Resource Mobilization, and Collective Action Frames*, h. 145.

pemberitaan media secara luas. Para pembicara yang diundang adalah pimpinan HT dari cabang lokal dan mancanegara, antara lain: Dr. Muhammad Utsman dan Muhamad al-Khaththath (Indonesia), Ismail al-Wahwah (Australia) dan Syarifuddin M. Zain (Malaysia).²¹ Isu utama yang didiskusikan adalah mengenai pentingnya mengembalikan khalifah Islam sebagai respon terhadap permasalahan umat Islam. Sejak 2000, perkembangan HTI terlihat menonjol dalam kaitannya dengan keanggotaan, media, dan operasi. HTI mulai menemukan momentum untuk melakukan mobilisasi secara terbuka. Ini berarti bahwa gerakan ini telah bergerak dari tahap pembinaan ke tahap interaksi dengan masyarakat luas.

Perjuangan HTI nampaknya tidak sia-sia, hingga pada tahun 2006 HTI berhasil mendapatkan restu pengakuan dari negara Indonesia. Legalisasi ini memungkinkan HTI untuk bergerak lebih leluasa tidak hanya menjangku komunitas-komunitas Muslim dan kampus tetapi juga membangun pengaruh di lingkup birokrasi pemerintahan. Seruan khilafah yang diusung oleh HTI tidak hanya disuarakan di masjid dan kampus saja, tetapi juga sudah mulai merambah dan menjangkau ruang-ruang publik yang lebih luas, seperti lewat seminar-seminar yang diadakan di hotel-hotel dan kantor-kantor instansi pemerintahan. Dengan jangkauan pengaruh yang semakin luas itulah, maka HTI mulai percaya diri dan mulai mengupayakan tahapan terakhir menuju penegakan khilafah, yakni mencari dukungan (thalabun-nushrah) kepada tokoh-tokoh kuat (ahlul-quwwah) untuk bersama HTI dalam rangka mengambil alih kekuasaan. Belum ada tanda bahwa langkah ini membuahkan hasil yang berarti, HTI sudah terlebih dahulu dibubarkan oleh pemerintah.

Organisasi dakwah HT secara resmi mendapat pengakuan oleh negara tahun 2006, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. HTI terdaftar di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri dengan nomor 44/D.III.2/VI/2006 sebagai organisasi sosial keagamaan, meskipun dalam wacana publiknya HTI

²¹ Herry Muhammad dan Kholis Bahtiar Bakri, “Khilafah Islamiyah: Ibarat Pelari Maraton,” *Gatra* 30:11, June 10, 2000.

menyebut diri sebagai partai politik. Asas organisasi yang diserahkan ke Kemendagri menyatakan bahwa HTI adalah “gerakan dakwah Islam di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”Teks ini sekilas memberi kesan bahwa HTI mengakui Pancasila dan NKRI. Dari sini terlihat bahwa HTI adalah organisasi yang beroperasi di wilayah NKRI yang negaranya menggunakan ideologi Pancasila. Setelah secara resmi HTI mendapatkan pengakuan dari negara, maka sejak itulah, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang secara resmi mengakui HTI sebelum akhirnya dibubarkan pada tahun 2017.

D. Politik Identitas dan Proses Rekrutmen; Membaca HTI

Lampung

Sejak runtuhnya rezim Orde Baru, HTI di Indonesia mulai menunjukkan aktivitasnya secara terbuka. Di antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan HTI antara lain:

1. Demonstrasi: Memperjuangkan Aspirasi dan Politik Identitas HTI

Identitas HTI yang paling menonjol di ruang publik adalah gerakan protesnya di jalanan, dalam bentuk pawai dan demonstrasi. Sejak awal tahun 2000, HTI bisa dikatakan sebagai gerakan Islam yang paling aktif menyuarakan aspirasi dan tuntutan di jalanan. Dalam banyak kasus, aksi jalanan HTI diatur secara sistematis dan terorganisir baik pada level nasional maupun provinsi dalam merespon isu-isu nasional dan internasional. Karena itu aksi HTI selalu dikenal sebagai organisasi yang menyuarakan aksi demonstrasinya secara damai. Kesuksesan HTI dalam menghimpun masa 12.000 orang dengan melakukan long mars dari Monas menuju Stadion Senayan untuk menuntut penerapan syariat Islam melalui pengembalian Piagam Jakarta ke dalam konstitusi,²²

²² Hizbut Tahrir Indonesia, *Mengenal Hizbut Tahrir Indonesia: Partai Politik Islam Ideologis* (Jakarta: HTI, 2004), h. iv.

Selain isu lokal dalam negeri, HTI kerap kali aktif merespon isu-isu global yang terkait dengan kebijakan Amerika terhadap negeri-negeri Muslim, dan isu ini tampaknya lebih dominan. Sebagai contoh misalnya pada 4 Januari 2009, HTI mengadakan demonstrasi secara serentak di berbagai kota besar di Indonesia untuk mengutuk agresi militer Israel di Gaza. Dalam penyampaian aksi-aksi solidernya, HTI selalu memasukkan pesan untuk melawan sistem kapitalis dan ide-ide Barat yang diklaim sebagai sumber permasalahan dunia, dan mengajak umat Islam untuk bersatu dan membangun kembali sistem pemerintahan khilafah sebagai solusi alternatif.

Praktek mengorganisir masa dalam bentukdemonstrasi juga dilakukan oleh HTI Lampung. Saat itu dengan atas nama penegakan Khilafah Islamiyah, HTI Lampung melakukan demonstrasi yang diberinama Rapat dan Pawai Akbar (RPA) 1436 Hijriah; Umat Tegakkan Khilafah. Ada sekitar sepuluh ribu warga Lampung yang terlibat dalam demonstrasi itu. Massa yang hadir terdiri dari pria, wanita, tua dan muda dan anak-anak dengan antusias berdatangan dari 13 kabupaten dan 2 kota yang ada di Provinsi Lampung. Mereka berkumpul di Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim dalam rangka mendengarkan rapat akbar dan orasi politik dari para pengurus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Salah satu orator berasal dari pimpinan DPP HTI yakni Farid Wajdi. Dalam orasinya ia mengatakan *"Umat Islam memiliki hukum yang sama, yakni syariah Islam. yakni hukum yang berasal dari Allah SWT. yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita sampai hari ini. Syari'ah Islam adalah satu satunya hukum yang wajib diterapkan dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara kita!"* ungkapan Farid Wajdi pun kemudian di sambut dengan pekikan gemuruh takbir oleh para peserta yang hadir saat itu.

2. Menyelenggarakan Seminar Dan Diskusi Public

Tidak hanya lewat demonstrasi, pasca di akuinya HTI oleh pemerintah, aktivitas intelektual HTI menemukan ekspresinya lewat seminar dan publikasi. Ini tentu saja merupakan strategi untuk menyebarkan ide-ide HTI dan menarik dukungan dari segmen terdidik dari masyarakat Indonesia. Seminar aktif dilaksanakan mulai dari

tingkat daerah, nasional, dan bahkan internasional dalam merespon isu lokal, nasional, dan global. Dua konferensi internasional, misalnya, telah diadakan di Jakarta pada tahun 2000 dan 2007. Konferensi yang kedua dihadiri oleh sekitar 80.000 pendukung dan dianggap sebagai konferensi HT terbesar di dunia. Akhir-akhir ini, sejak pertengahan tahun 2008, HTI tiap bulannya mengadakan diskusi publik yang diistilahkan "*Halaqah Islam dan Peradaban*" baik di Jakarta maupun di tingkat propinsi, dengan mengangkat berbagai isu aktual. Dalam seminar tersebut, HTI biasanya mengundang pembicara dari kalangan intelektual/cendekiawan, pengamat politik atau ekonomi, kalangan pemerintah, dan juga pembicara dari kalangan intern HTI sendiri.

Penyelenggaraan seminar dan diskusi publik juga dilakukan oleh HTI Lampung dalam rangka konsolidasi kader lama dan rekrutmen calon kader baru. Misalnya HTI Lampung pernah menggelar Konferensi Islam dan Peradaban (KIP) 1435 H dengan tema "Dari Bumi Ruwa Jurai Menuju Khilafah" di Graha Bintang Universitas Malahayati Bandar Lampung. Peserta yang hadir saat itu cukup banyak mencapai 1.850 orang. Konferensi yang mensosialisasikan syariah dan khilafah ini diadakan oleh DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Lampung.

Beberapa pembicara yang hadir pada acara tersebut antara lain Dudy Arfian, Ahmad Tusi, S.T.P., M.Si., Diding Suhandy, Ph.D, dan ketua DPP Mujiyanto. Secara umum mereka menyoroti kegagalan sistem demokrasi liberal produk Barat yang diterapkan di Indonesia yang menimbulkan berbagai masalah hingga berimplikasi pada keterpurukan. Menurut mereka demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan manusia bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga demokrasi dianggap sebagai sistem kufur karena bertentangan dengan akidah Islam, yakni sekularisme. Selain itu, demokrasi dianggap sebagai biang keladi kemunculan kapitalisme yang mencengkeram Indonesia.

3. Publikasi Melalui Media

Penggunaan sarana media sebagai bentuk publikasi dakwah perjuangan HTI ke audiens yang lebih luas di masyarakat kerap kali dilakukan oleh HTI. Mereka sadar bahwa media menjadi sarana untuk menjaga komunikasi dan kesatuan pemikiran di kalangan anggota dan simpatisannya. Karena itu, HTI kerap kali membuat pamflet, buletin, majalah, tabloid, booklet, buku, DVD, dan websites sebagai corong perjuangannya. Diantara publikasinya adalah dengan menerbitkan pamflet mingguan bernama “Buletin al-Islam”, yang terbit sejak 1994. Salim mencatat bahwa pamflet menjadi “channel komunikasi intra-grup” bagi anggota HTI dikemudian hari.²³Buletin yang rutin terbit ini kemudian pada tahun 2000 dirubah namanya menjadi *Syabab Hizbut Tahrir*. Sejak itu, buletin, yang hanya terdiri dari empat halaman ini, mulai didistribusikan secara luas ke masjid-masjid pada setiap hari Jumat. Tidak hanya berhenti pada buletin, publikasi HTI yang lebih komprehensif pun dirancang, dan terbitlah majalah *al-Wa’ie* (kesadaran), sebuah majalah bulanan dengan tampilan cukup bagus, yang dicetak dalam jumlah yang cukup banyak yakni sekitar 15.000 exemplar per edisi.²⁴untuk memperkokoh perjuangannya, maka pada tahun 2008, HTI menerbitkan *MediaUmat*, sebuah tabloid yang terbit bulanan dengan kualitas tampilan cetak cukup bagus.

Tidak berhenti pada publikasi media, HTI pun menambah amunisi publikasinya dengan melakukan penerjemahan buku-buku HT dan pemikiran-pemikiran pimpinan HT, khususnya karya-karya sang pendiri HT, yakni Taqiyuddin an-Nabhani. Buku-buku hasil terjemahan itu diterbitkan oleh penerbit yang mempunyai kedekatan dengan HTI, diantaranya penerbit al-Izzah di Bangil Jawa Timur, Pustaka Thariqul Izzah dan Mahabbah Cipta Insani di Bogor, dan belakangan, HTI membentuk penerbit sendiri bernama HTI Press di Jakarta. Penerbit

²³ Agus Salim, *The Rise of Hizbut Tahrir Indonesia (1982-2004): Its Political Opportunity Structure, Resource Mobilization, and Collective Action Frames*, h. 140-144.

²⁴ Greg Fealy, *Hizbut Tahrir in Indonesia: Seeking a “Total” Islamic Identity*, h. 158.

HTI Press lebih fokus menerbitkan buku-buku HTI resmi dan standar (*kutub mutabannat*). Buku-buku *mutabannath* haruslah mengacu kepada karya-karya penting yang ditulis oleh Nabhani, yang kemudian menjadi panduan wajib di *halaqah-halaqah* yang diadakan oleh HTI.

Yang menarik dari publikasi HTI adalah bahwa ia hanya menyediakan buku-buku resmi HTI ditempat-tempat resmi yang ditunjuk oleh HTI, bukan di toko-toko buku biasanya. Mereka memiliki outlet sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa target utama konsumennya publikasi HTI adalah anggota HTI itu sendiri. sejak diakuinya HTI oleh negara, maka HTI secara terbuka menyampaikan publikasinya lewat website resmi di internet yang terbit sejak 2004 bernama (www.hizbut-tahrir.or.id). Dalam website ini HTI membuka ruang bagi anggota untuk mengikuti informasi teranyar tentang gagasan dan aktivitas HTI. Website ini menyediakan berbagai fasilitas seperti mailing list, buku HTI online, dan buletin Jumat yang kesemuanya dapat diakses dan diunduh dengan gratis oleh siapa pun.

Dalam konteks lokal, HTI Lampung kerap kali bekerjasama dengan media televisi dan cetak yang ada di Provinsi Lampung, seperti dalam kegiatan: Siaran HTI Lampung di Lampung TV dengan tema “Menyoal ISIS”. Pada kegiatan itu, Hizbut Tahrir Indonesia DPD I Lampung diundang khusus oleh Lampung TV dalam program acara dialog “Tamuh Hari Ini”, Hammam Abdullah sebagai Humas HTI Lampung tampil sebagai narasumber yang menjelaskan terkait persoalan ISIS tersebut.²⁵

Siaran program kajian HTI Lampung melalui media televisi juga dilakukan di Radar TV. Program bulanan muslimah HTI Lampung dalam ‘Halo Lampung’ Radar TV Lampung, diantaranya bertema: “Kesehatan Reproduksi dalam Pandangan Islam” Program bulanan tersebut di mulai sejak bulan September 2012. Program siaran live “Halo Lampung” rutin dilakukan pada Jum’at di minggu pertama setiap bulannya. Siaran berlangsung pada pukul 16.30 s.d 17.30 WIB. Bagi yang berada di luar Lampung, dapat menyaksikan siaran MHTI

²⁵ “[Http://hizbut-tahrir.or.id/2015/03/16/siaran-Humas-Hti-Lampung-Menyoal-Isis-Di-Lampung-Tv/](http://hizbut-tahrir.or.id/2015/03/16/siaran-Humas-Hti-Lampung-Menyoal-Isis-Di-Lampung-Tv/),” n.d.

Lampung via live streaming di www.radarlampung.co.id. Salah satu tema yang dihadirkan adalah membahas tentang pandangan Islam mengenai kesehatan reproduksi. Untuk siaran kali itu dihadirkan nara sumber Ustadzah Ade Kumalasari (DPD I MHTI Lampung).²⁶

Siaran Live MHTI Lampung juga bertema: “*Khilafah Menjamin Kebahagiaan dan Kesejahteraan Keluarga*”. Dalam acara tersebut, dihadirkan 2 pembicara dari MHTI Lampung, Ustadzah Alif Sholihah (Komunitas Perempuan Peduli Keluarga) dan Ustadzah Ade Kumalasari (DPD I MHTI Lampung). Mereka berpendapat bahwa sudah saatnya negara kita mengganti sistem yang rusak dan merusak ini dengan penerapan syariat Islam dalam sistem khilafah Islamiyah yang dapat menjamin keselamatan dan kehancuran.²⁷ Tidak hanya melalui media elektronik saja, publikasi HTI Lampung juga dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan media cetak yang ada di Lampung, seperti Lampung Post.

4. Pendekatan Pada Tokoh dan Lembaga Pendidikan

Dalam rangka sosialisasi program HTI Lampung juga melakukan pendekatan pada tokoh (tokoh lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat). Seperti yang dilakukan oleh Pengurus DPD I HTI Lampung, yang melakukan kunjungan ke Rektor Universitas Lampung (Unila), Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. Pada kesempatan tersebut HTI Lampung yang diwakili oleh Hammam Abdullah menjelaskan seputar HT dan dakwahnya di tengah-tengah masyarakat. Dalam kesempatan itu Hammam menegaskan bahwa jika Indonesia ingin maju dan sejahtera maka solusinya adalah terapkan syariah dan khilafah.²⁸

²⁶ “<http://hizbut-tahrir.or.id/2012/09/13/siaran-Bulanan-Mhti-Lampung-Dalam-Halo-Lampung-Radar-Tv-Lampung-Kesehatan-Reproduksi-Dalam-Pandangan-Islam/>,” n.d.

²⁷ “<http://hizbut-tahrir.or.id/2012/07/04/siaran-live-mhti-lampung-khilafah-menjamin-kebahagiaan-dan-kesejahteraan-keluarga/>”.

²⁸ “<http://hizbut-tahrir.or.id/2015/02/27/kunjungan-hti-lampung-ke-lampung-post/>”.

E. Dakwah dan Rekrutmen HTI

HT merepresentasikan diri sebagai organisasi pergerakan berbasis ideologi Islam dan tujuan utamanya adalah mendirikan khilafah dan menerapkan syariah. Meskipun pendirian HT adalah respon an-Nabhani terhadap situasi Timur Tengah di tahun 1950-an, namun buku-buku resmi HT secara normative menyatakan pendirian HT sebagai respon terhadap Q.S. Ali Imran: 104, yang artinya: “*Dan jadilah umat yang menyeru kepada amar ma’ruf dan mencegah dari kemunkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung*”. Bagi HT, ayat ini memerintahkan umat Islam mendirikan sebuah komunitas atau jamaah dalam bentuk partai politik demi menjalankan dakwah. Alasannya karena kegiatan dakwah secara substansial terkait erat dengan politik, sebab elemen penting dakwah ialah mengajak pemerintah untuk beramar *ma’ruf nahy munkar* sesuai dengan syariat Islam. HT bermaksud “*membangkitkan kembali kondisi umat Islam dari keterpurukan yang demikian parah, dan membebaskan umat dari ide, sistem perundang-undangan yang kufur serta membebaskan mereka dari hegemoni kekuasaan negara-negara kafir*”.²⁹

Dalam upaya membangkitkan umat, HT mengawali dengan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan kemundurannya. HT menganggap kelemahan umat disebabkan oleh kegagalannya dalam memahami dan menerapkan Islam secara komprehensif. Menurut An-Nabhani, gerakan Islam telah gagal membangkitkan umat karena tiga alasan: pertama, tidak adanya pemahaman utuh tentang *fikrah Islamiyah* (pemikiran Islam) di kalangan umat Islam; tidak adanya deskripsi yang jelas tentang *tariqah Islamiyah* (metode Islami); dan ketiga, tidak ada upaya menggabungkan *fikrah* dan *tariqah* sebagai kesatuan yang utuh. Untuk membangkitkan umat, HT berupaya merubah ide dan persepsi yang ada saat ini di kalangan umat dan mendakwahkan apa yang mereka anggap pemahaman Islam yang benar, yakni ajaran Islam yang memiliki *fikrah* dan *tariqah*. Oleh karena itu, aktivis-aktivis HT diarahkan mengemban dakwah Islam dengan mentransformasikan apa

²⁹ Labib, ed., *Mengenal Hizbut Tahrir* (Depok: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), h. 2-4.

yang dipandang sebagai ‘masyarakat yang rusak’ ke masyarakat Islami, agar Islam menjadi basis pemikiran public.³⁰

Menurut an-Nabhani, metode dakwah HT didasarkan kepada pengalaman historis Nabi ketika mendakwahkan Islam di kalangan orang kafir di Mekah dan Madinah, yaitu dari dakwah rahasia ke dakwah terbuka. Menurut HT, kondisi sekarang mirip dengan kondisi masyarakat di Mekah ketika Nabi pertama kali berdakwah. Ini disebabkan umat Islam saat ini hidup di *Dar Kufr* (wilayah kekufuran), dimana sistem hukum tidak berdasarkan wahyu Tuhan.

Karena itu, tahapan dakwah bagi HT terdiri dari tiga tahap: tahap *tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan), *tahap tafa’ulma’al ummah* (interaksi dengan umat), dan *istilam al-hukm* (pengambil-alihan kekuasaan).³¹ Doktrin dakwah ini punya andil besar dalam memotivasi anggota-anggotanya untuk menyebarkan ide HT dan menjalankan rekrutmen anggota baru.

1. Rekrutmen Melalui Ikatan Interpersonal

Proses perekrutan anggota baru HTI dilakukan melalui hubungan interpersonal antara para aktivis HTI dengan calon anggota. Mekanisme rekrutmen ini mirip dengan yang dipakai sekte-sekte agama di Barat tahun 1960-an yang memanfaatkan “jaringan sosial yang sudah ada dan ikatan interpersonal.”³² Meminjam kata-kata Lorne L. Dawson, modus yang dipakai adalah “kawan merekrut kawan, anggota keluarga merekrut anggota keluarga lainnya, dan tetangga merekrut tetangga.”³³ Pola yang sama juga ditemukan oleh John Lofland dan Rodney Stark dalam studi yang mereka lakukan terhadap pengikut *Sun Myung Moon* (the Moonies). Mereka melihat bahwa konversi ke sekte

³⁰ Ibid, h. 23.

³¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam* (Jakarta: HTI Press, 2007), h. 51.

³² Lorne L. Dawson, *Who Joins New Religious Movements and Why: Twenty Years of Research and What Have We Learned?*, h. 119

³³ Lorne L. Dawson.

Kristen ini sebagian besar ditentukan oleh ikatan afektif antara aktivis sekte dan calon anggota.³⁴

Beberapa informan mengatakan bahwa partisipasi awal mereka di training HTI, seminar dan *halaqah* karena diajak dan didorong oleh keluarga, senior dan perkawanan di antara mereka. Pada awalnya kebanyakan mereka tidak mengetahui bahwa kegiatan tersebut diorganisir oleh HTI. Para perekrut mengajak keluarga dan kawan mereka untuk menghadiri pelatihan dan diskusi HTI dengan dalih untuk mengaji atau belajar Islam dalam rangka meningkatkan pengetahuan agama.

Doktrin HT yang tertanam kuat dalam benak para aktivis HTI membuat mereka begitu aktif mencari anggota baru. Para aktivis HTI memandang dakwah sebagai kewajiban seumur hidup bagi setiap Muslim. Karena itu mereka akan berupaya sekuat tenaga demi tegaknya Khilafah Islamiyah di bumi ini. Untuk mengukur tingkat keberhasilan rekrutmen anggota baru, setiap minggu dalam pertemuan *halaqah*, mereka selalu menanyakan dan mengevaluasi sejauh mana perkembangan dakwah mereka, dan menghitung sudah berapa banyak orang yang mereka dekati dalam seminggu.

Selain memanfaatkan jaringan sosial yang telah ada, para aktivis HTI juga aktif mencari anggota baru dengan cara membangun hubungan sosial yang baru. Mereka didorong untuk bersikap terbuka dan aktif membuat pertemanan demi rekrutmen. Ketika menemukan kenalan baru, mereka akan menjaga hubungan silaturahmi tersebut dan mengarahkan kenalan ini untuk ikut ke kegiatan-kegiatan HTI. Jika seseorang menunjukkan animo terhadap ide HTI, maka aktivis HTI akan menjaga kontak dengan orang tersebut dalam rangka mengarahkannya ke kegiatan HTI selanjutnya hingga ia menjadi anggota penuh. Salah seorang informan mengatakan bahwa pada awalnya, ketika mengikuti kegiatan HTI, ia belum yakin untuk masuk ke gerakan tersebut, namun ia terkesan dengan aktivis HTI yang

³⁴ John Lofland and Rodney Stark, "Becoming a World-Saver: A Theory of Conversion to a Deviant Perspective."

nampak perhatian dan peduli kepadanya, serta tidak henti-hentinya mendekatinya hingga akhirnya ia luluh dan ikut bergabung.

2. Kaderisasi di Lampung

Salah satu cara HT mengawal keseragaman ideologinya di kalangan anggota ialah dengan cara *tabanni*, yaitu proses pengadopsian karya utama an-Nabhani. Perlu diketahui bahwa HT mengadopsi *tsaqafah mutabannah* yakni referensi yang terdiri dari kitab-kitab yang ditujukan kepada partai dan para anggotanya untuk mengarahkan tindakan mereka dan *Ṣaqafah gayr mutabannah* yakni referensi kitab yang harus dibaca dan dirujuk oleh anggota HT dan umat Islam pada umumnya.³⁵ Adalah kewajiban bagi setiap anggota menganut yang pertama dan penyimpangan terhadap kitab-kitab tersebut bisa berakibat sanksi terhadap anggota, sedangkan kitab-kitab yang kedua sifatnya sekunder dan tidak mengikat. Kedua *Ṣaqafah* tersebut berisi ide-ide pilihan, pendapat dan hukum yang terkait dengan berbagai aspek yang dipercayai kesemuanya bersumber dari Islam yang 'sebenarnya'. Kitab-kitab tersebut antara lain: 1) *Nizam al-hukm fi al-Islam*; 2) *Nizam al-Islam*; 3) *Nizam al-Iqtishad fi al-Islam*; 4) *At-Takattul al-Hizbiy*; 5) *Nizam al-Ijtima'iy fi al-Islam*; 6) *Ad-Daulah al-Islamiyyah*; 7) *Nadharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir*; 8) *Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir*; 9) *Al-Khilafah*; 10) *Kaifa Hudimat al-Khilafah*; 11) *Mafahim Hizbut Tahrir*; 12) *Naqd al-Iṣtirakiyah al-Marksiyah* (Refutation of Marxist Communism); 13) *Ahkam al-Bayyinah*; 14) *Nida Har*; 15) *Syakhsiyah Islamiyah*; 16) *Muqaddimah ad-Dustur*; 17) *Nizam al-'Uqubat*; 18) *At-Tafkir*; 19) *Sur'atul Badi'ah*; 20) *Kitab al-Fikr al-Islamiy*; 21) *Naqd Nazariyah al-Iltizami fi al-Qawanini al-Garbiyah*; 22) *Siyasah al-Iqtishadiyah Mutlaqah*; dan 23) *Amwal fi Daulah al-Khilafah*.

Literatur HTI tidak membagi secara jelas buku-buku di atas berdasarkan kategori kedua *tsaqafah*. Namun, beberapa informan menyebutkan contoh *tsaqafah mutabannah* yang antara lain mencakup: *Nizamul Islam*, *al-Takattul al-Hizbiy*, *Mafahim Hizbut Tahrir*, dan *ad-Daulah al-Islamiyah*, sedangkan *tsaqafah ghayr mutabannah* mencakup

³⁵ Suha Taji-Farouki, *A Fundamental Quest: Hizb Al-Tahrir and the Search for the Islamic Caliphate*.

antara lain: *Nizam al-Iqtishad fi al-Islam*, *al-Fikr al-Islamiy* dan *Nizam al-'Uqubat*. Buku-buku yang tersebut diatas merupakan kurikulum bagi kader baru (*daris*) dan *hizbiyyin*, dan setiap anggota baik yang junior maupun senior diwajibkan mengikuti *halaqah* mingguan untuk mempelajari dan mendalami buku-buku diatas. Jika anggota tidak hadir dalam *halaqah* tanpa alasan yang jelas, maka bisa mendapatkan teguran atau peringatan, dan bahkan bisa berujung pemecatan anggota.

3. Halaqah Sebagai Proses Indoktrinasi

Ada cara unik yang dilakukan oleh HTI dalam rangka kaderisasi, yakni melalui istilah *Halaqah*. *Halaqah* adalah kelompok studi dalam bentuk lingkaran. Cara ini dianggap sebagai cara unik dan penting sebagai medium kaderisasi dan indoktrinasi. Menurut Taji-Farouki mendeskripsikan *halaqah* sebagai bentuk “unit kecil dari anggota partai dan kader baru yang dibentuk sebagai wadah atau medium untuk mengkaji ideologi partai secara intensif dibawah bimbingan seorang anggota senior yang sudah berpengalaman”.³⁶ Kegiatan setiap *halaqah* terdiri dari lima anggota baru yang berkumpul duduk mengelilingi seorang pembina. Dalam setiap *halaqah* waktu yang dibutuhkan biasanya dua jam. Kehadiran anggota baru dalam *halaqah* dijadikan status keanggotaan seseorang.

Anggota HTI biasa menyebutnya dengan sistem pendidikan *tatsqif* untuk membedakannya dari sistem pendidikan di sekolah atau di perguruan tinggi. Perbedaan penyebutan ini dikarenakan tujuan *halaqah* tidak hanya mendidik anggota, namun juga mengarahkan apa yang telah mereka pelajari dalam *halaqah* untuk dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan para anggotanya sehari-hari. Dengan cara ini, *halaqah* dapat secara langsung berperan menanamkan ideologi HT kepada kader baru dan anggota penuh baik dalam pemikiran juga dalam perilaku kehidupan mereka sehari-hari.

Tugas para pembina *halaqah*, *musyrif* atau *musyrifah*, bertugas menjaga pemahaman para anggota jemaahnya agar tetap sesuai dengan pola penafsiran yang ditetapkan HT. Para pembina berperan sebagai

³⁶ Suha Taji-Farouki.

perpanjangan mulut an-Nabhani. Para pembina akan terus memantau dan mengarahkan mereka agar sesuai dengan perspektif pembina. Dengan cara demikian, kesatuan pemikiran diantara anggota bisa dipelihara dengan baik. Karena itu, wajar jika sudah masuk menjadi anggota HTI biasanya sulit untuk menerima pendapat para guru diluar guru HTI.

Dalam prosesnya, indoktrinasi dalam *halaqah* menggunakan metode pendidikan model tradisional layaknya di pesantren, dimana seorang guru memegang otoritas untuk mentransfer pengetahuannya ke murid-muridnya tanpa ada ruang kritisisme atau perdebatan. Proses belajar biasanya diawali dalam *halaqah* dimulai dengan meminta masing-masing anggota membaca dan menelaah paragraf demi paragraf dari buku yang dipelajari; setelah itu pembina kemudian meminta anggota lainnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan teks yang dibaca dan hubungannya dengan perkembangan kontemporer, setelah itu sang pembina akan menjawab atas pertanyaan yang diajukan.

Bagi anggota *akhwat* (perempuan), proses belajar membutuhkan waktu lebih lama dalam menamatkan sebuah kitab dibandingkan dengan anggota *ikhwan*(laki-laki). Perbedaan tersebut terjadi karena yang pertama memakai kitab Arab sedangkan yang kedua menggunakan buku terjemahan Indonesia. Masing-masing *akhwat* dalam *halaqah* harus membaca teks arab gundul yang telah dan kemudian menerjemahkannya, setelah itu dilakukan penelaahan. Sebagai perbandingan, kegiatan belajar pada kelompok *ikhwan* bisa memakan waktu satu tahun untuk menamatkan kitab *Nizam al-Islam*, sementara pada kelompok *akhwat* lebih lama yakni bisa menghabiskan waktu dua tahun. Dalam setiap sekali pertemuan *halaqah*, para anggota biasanya hanya mempelajari dua atau tiga paragraf dari sebuah kitab, tergantung kepada kemampuan masing-masing anggota dalam memahami teks.

Seorang *musyrif* atau *musyrifah* bertanggung jawab membimbing dan memantau setiap perilaku para anggotanya. Sang pembina sudahlah harus menjadi anggota penuh yang memandang bimbingan

sebagai kewajiban dalam mengembangkan syi'ar Islam. Bahkan, HTI mewajibkan setiap anggota dikemudian hari untuk menjadi pembina. Tugas yang diemban tidak hanya menjadi pembina *halaqah*, tetapi juga membantu anggota binaannya untuk meningkatkan pengetahuan dasar mereka tentang ajaran Islam, seperti; praktek ibadah shalat, puasa, membaca al-Qur'an sesuai tajwid, dan sebagainya. Sang pemina juga diharuskan memonitor perilaku sehari-hari anggota ketika mereka diluar *halaqah*. Hal ini dilakukan agar para anggota senantiasa berada dalam koridor syariat Islam. Tugas pembina adalah selalu menekankan kesadaran dan kedisiplinan bagi para anggota binaannya. Misalnya, anggota yang terlambat datang 15 menit setelah dimulainya *halaqah* maka tidak akan diizinkan ikuthalaqah, dan hal ini harus disepakati bersama. Karena itu, peran seorang pembina sangat penting dalam mengarahkan, menanamkan dan menjaga keyakinan ideologis, politik, dan religius ala HT ke kader-kader baru.

Tidak hanya lewat *halaqah* kajian Islam dilakukan. HTI juga menjalankan program tambahan pelajaran bagi anggotanya, yang mereka istilahkan dengan *dirasah fardiyyah* dan *tsaqafahtambahan*. Metode ini dilakukan dalam rangka memperluas pemahaman ideologis anggota dan melatih daya pisau analisa mereka dalam menganalisa peristiwa-peristiwa sosial dan politik yang terjadi di Indonesia berdasarkan perspektif HT yang telah mereka pelajari sebelumnya. Jika ditemukan wawasan yang tidak sesuai dengan alur berfikir HTI, maka tugas pembina adalah memberikan jawaban kepada kader untuk memproduksi jawaban dan analisa yang sesuai dengan ideologi HT.

Pertemuan sebagai bentuk pengujian ini dinamai *mutataba'at usbu'iyah*. Menurut beberapa aktivis *akhwat*, buku pertama yang harus mereka kaji dan kuasai adalah *Min Muqawwimat an-Nafsiyah al-Islamiyah* (Pilar-pilar Kepribadian Islami) yang diterbitkan oleh HTI. Di lihat dari isinya, buku ini berisi sejumlah ayat dan hadits dengan sajian berbagai tema tentang kiat-kiat membangun kepribadian seorang muslim. Menarik untuk dicatat bahwa aktivis *akhwat* biasanya dalam menandai kitab-kitab rujukannya selalu memakai kode-kode atau singkatan-singkatan, seperti: MU (*mutataba'atusbu'iyah*), DF (*dirasah*

fardiyyah), waspol (*wawasan politik*) dan MM (*min muqawwimat*). Dari semua kegiatan belajar yang diadakan oleh HTI, tugas seorang *hizbiyyin* cukup sibuk dalam mengatur waktu mengingat kebanyakan status mereka adalah seorang mahasiswa.

F. Menimbang Nasib HTI Pasca Pembubaran

Wacana pembubaran ormas anti pancasila sudah lama diwacanakan, akan tetapi pihak pemerintah nampaknya masih ragu untuk bertindak.³⁷ Karena itu, isu ini kemudian ramai dan menjadi polemik. Pihak pemerintah masih menimbang-nimbang untung ruginya jika aturan pembubaran ormas anti pancasila di keluarkan. Pasca Pilkada DKI Jakarta yang dimenangkan oleh Anis-Sandi, dan adanya dugaan keterlibatan ormas-ormas yang dianggap redikal dan anti pancasila yang memenangkan pasangan tersebut ditambah memanasnya isu politik yang mengancam keutuhan negara, maka pihak pemerintah semakin yakin dan membulatkan tekadnya untuk mengeluarkan regulasi baru berbentuk perpu tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian menelan korban pertama yakni pembubaran ormas HTI.

Jika merujuk pada berbagai kebijakan banyak negara yang telah diambil dalam memutuskan terkaitkeberadaan HT, maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga cara pilihan yang bisa diambil oleh sebuah negara: *Pertama*, mengakui HTI sebagai organisasi resmi; *Kedua*, tidak mengakui tetapi juga tidak melarang; dan, *Ketiga*, melarang. Sebagai contoh Pemerintah Inggris memilih langkah untuk tidak mengakui tetapi tidak melarang keberadaan HT. Dengan status ini HT tetap beroperasi sebagaimana banyak organisasi lain yang tidak secara remi terdaftar. Konsekuensinya organisasi tersebut tidak bisa menerima bantuan dari negara. Konsekuensi lainnya adalah pihak pemerintah bisa mengambil tindakan terhadap anggota jika HT melanggar hukum

³⁷ Meskipun Mendagri sudah lama bicara soal pembubaran ormas tetapi pada kenyataannya ini tidak mudah dilakukan, salah satunya karena *political will* yang lemah, UU Ormas yang memberikan persyaratan sulit untuk membubarkan ormas, atau risiko tuduhan pemerintah melanggar kebebasan berserikat dan berkumpul yang dilindungi UU.

seperti mendukung terorisme, melakukan kekerasan, ujaran kebencian, tindakan makar, atau bisa jadi pencucian uang.

Dari ketiga langkah di atas, pemerintah Indonesia kini memilih langkah ketiga yakni membubarkan dan melarang organisasi HTI. Pilihan ini adalah pilihan yang paling ekstrim atau keras dan penuh resiko. Pilihan ketiga ini nampaknya mengikuti jejak pilihan yang dilakukan oleh pemerintahan Jerman, Rusia, dan Belanda.

Bermodalkan Perpu No.2 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah Indonesia dengan resmi mencabut badan hukum HTI. Berkat putusan tersebut, maka Indonesia secara resmi telah mengikuti 20 negara³⁸ yang sebelumnya telah melarang kehadiran HT. Argumentasi pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hampir sama dengan argumentasi yang dimiliki oleh negara-negara yang membubarkan HTI sebelumnya yakni mengatakan kehadiran HT dapat mengancam keutuhan negara. Hal ini terjadi karena HT mengusung visi menegakkan Negara Islam berbasis khilafah atau *khilafah islamiyah*.³⁹

Perpu pembubaran HTI telah dikeluarkan, lalu apa langkah selanjutnya? Mesti diingat bahwa membubarkan sebuah organisasi tak sama dengan menghapus paham yang dianggap pemerintah sebagai ajaran radikal. Menghapus sebuah paham dalam pikiran para simpatisan HTI tentu jauh lebih sulit dan ini adalah tugas lanjutan dari langkah awal pembubaran HTI.

Pasca diputuskannya HTI untuk dibubarkan, maka tantangan sesungguhnya bagi pihak pemerintah Indonesia sendiri adalah harus memastikan bahwa ideologi khilafah juga ikut “terkubur” seiring dengan “terkuburnya” organisasi HTI tersebut. Tentu ini tugas yang sangat berat. Jika mengaca pada pengalaman beberapa negara yang terlebih dahulu HT, faktanya bahwa di beberapa negara, anggota

³⁸ Lewat Perppu itu, maka negara Indonesia telah resmi mengikuti jejak negara-negara yang sudah terlebih dahulu membubarkan HT, seperti: Mesir, Yordania, Rusia, Jerman, Pakistan, hingga Malaysia.

³⁹ Visi tersebut diusung sejak HT didirikan pada 1953, di Palestina, oleh Taqiyuddin an-Nabhani

dan simpatisan HT faktanya tetap bertahan dan memegang teguh visinya meski telah dilarang oleh pemerintah. Sebagai contoh, di negara Kirgistan, Kazakstan, Tajikistan, Mesir, Turki, Bangladesh dan Pakistan, eks anggota HT ternyata sampai saat ini masih melanjutkan perjuangan mereka secara terselubung meski telah dinyatakan ilegal oleh pemerintah.

Apa yang terjadi di negara Kirgistan, Tajikistan, dan Kazakstan tentu sangat mungkin bisa saja terjadi di Indonesia. Apalagi jika kemudian Mahkamah Konstitusi menolak berkas gugatan atau *judicial review* yang diajukan HTI beserta ormas-ormas pendukung lainnya terhadap Perppu pembubaran Ormas tersebut. Bahkan menurut beberapa analis politik memperkirakan bahwa para eks anggota HTI akan membentuk ormas baru demi mempertahankan pandangan *khilafah islamiyah* yang selama ini digugu kebenarannya.⁴⁰

Pembentukan ormas baru sebagai pengganti HTI sangat mungkin dilakukan karena meski telah dicap sebagai organisasi ilegal, namun para kader atau simpatisan HTI tetap berhak untuk kembali berkumpul dan berserikat dengan payung hukum organisasi lain. Para pengurus lama di HTI seperti Ismail Yusanto (juru bicara HTI) dapat tiba-tiba muncul dengan nama organisasi baru yang mirip dengan HTI demi melunturkan kecurigaan pemerintah terhadapnya. Hal itu sangat mungkin terjadi bagi HTI.

Kondisi tersebut mirip dengan apa yang terjadi di negara-negara yang lebih dahulu membubarkan HT. Sebagaimana diungkapkan oleh Mohammad Iqbal Ahnaf di beberapa negara, para eks HT kerap kali memanfaatkan dan mengisi ruang kosong dan menjadi saluran

⁴⁰ Diantara analis politik yang mempunyai pandangan tersebut adalah Adi Prayitno, Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Lebih lanjut Adi menjelaskan bahwa perubahan nama adalah strategi yang paling realistis mengingat HTI telah memiliki struktur organisasi yang cukup rapi dari pusat hingga ke daerah. Menurutnya tidak gampang bagi mereka untuk bubar begitu saja. Mereka menganggap yang dibubarkan adalah rumah mereka. Tetapi bukan struktur yang mereka bangun secara emosional dengan cukup lama. *CNNIndonesia.com*.

perlawanan masyarakat dan kelompok-kelompok etnis tertentu yang miskin dan tertindas.⁴¹

Kemungkinan lain yang dilakukan oleh HTI pasca pembubaran organisasinya adalah beralih haluan dan berpindah bergabung kepada partai. mereka akan mencari partai-partai yang secara ideologi sama atau mirip dengan ideologi HTI sebelumnya, seperti PKS, PPP, PAN dan PBB. Kondisi ini akan terjadi jika mereka gagal memperjuangkan dan mempertahankan ideologinya dalam bentuk ormas. Hal ini juga sangat mungkin terjadi mengingat partai politik biasanya bersifat pragmatis dan tidak menganggap penting identitas dan agama suatu kelompok. Selama dapat memberi keuntungan elektoral, maka partai politik akan dengan terbuka bersedia menampung suatu kelompok tanpa peduli rekam jejak kelompok tersebut, bahkan mereka bisa menawarkan pemertinggi HTI posisi-posisi strategis di kepengurusan partai.

Langkah penggabungan dengan partai politik atau pembentukan partai politik baru tentu adalah langkah terakhir yang akan mereka lakukan setelah perjuangan mereka di MK tidak berhasil. Hal ini mengingat jumlah pengikut HTI yang sangat banyak bahkan mungkin di atas satu juta simpatisan di seluruh Indonesia yang terorganisir secara baik.

Prediksi penggabungan dengan menunggangi partai politik atau pendirian partai politik baru dikemudian hari juga dianggap lebih aman dan paling realistis untuk dilakukan. Pasalnya, lewat kendaraan partai, cita-cita HTI yang terrekam dalam visi dan misi yakni hasrat politik mendirikan negara islam di bumi ini akan dapat mungkin tersalurkan secara konstitusional. dan jika hal ini terjadi, maka tentu pemerintah akan lebih sulit lagi membubarkannya—tidak seperti pembubaran ormas saat ini—karena banyak kepentingan yang akan terjadi.

Hasrat HTI untuk menyalurkan kekuatannya melalui kekuatan-kekuatan politik di luar pemerintahan (pihak oposisi) sudah

⁴¹ Mohammad Iqbal Ahnaf, Setelah HTI Dibubarkan: Konsistensi atau Kompromi?, Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya Universitas Gajah Mada. "<https://crcs.ugm.ac.id/id/berita-utama/11189/setelah-Hti-Dibubarkan-Konsistensi-Atau-Kompromi.html>," n.d.

terlihat, misalnya dalam eskalasi politik pilkada DKI Jakarta baru-baru ini. HTI kerap kali melakukan demonstrasi menolak pencalonan AHOK, terlebih setelah AHOK diduga melakukan penistaan agama. Atas fenomena itu, maka jika kemudian gelagat HTI sebelum secara resmi dibubarkan, menunjukkan bahwa ia tidak alergi untuk beraliansi dengan kelompok-kelompok pejuang syariah lainnya.

Keterlibatan HTI dalam politik praktis yang menuntut adanya saling kompromi memang membuatnya telah bergeser dari khitah perjuangan sang pendiri yakni Taqiyuddin an-Nabhani yang menuntut anggota partai untuk tidak berkompromi. Meskipun begitu, jika melihat doktrin-doktrin dari HT, maka ada beberapa doktrin dalam HT yang memungkinkan mereka untuk bermanuver dalam kancah pemilu. Misalnya, dalam konteks pilpres, dukungan terhadap calon tertentu dibingkai berdasarkan doktrin yang membedakan antara pemilihan presiden dan kepala negara. Dalam perspektif ajaran doktrin HT, proses pemilu yang dilakukan dalam sebuah negara dianggap sebagai taktik(uslub), bukan metode (thariqoh). HT memandang bahwa jika itu “Metode” maka tidak boleh di rubah, akan tetapi jika masuk katagori “taktik” bisa bersifat fleksibel dalam arti boleh dirubah. Misalnya, pada pemilu-pemilu yang lalu, HTI mendorong partai-partai Islam untuk membangun “koalisi syariah”, bahkan secara tidak langsung mendukung calon-calon tertentu dalam pemilu.” Seruan-seruan tentang pentingnya memilih pemimpin seiman dan menyatukan kekuatan politik Muslim bisa dilihat sebagai upaya jangka panjang untuk memperluas basis dukungan bagi penerapan khilafah islamiyah dikemudian hari. Tapi perjuangan ini ternyata harus tertunda untuk sementara waktu karena HTI harus dibubarkan secara paksa atas nama keutuhan bangsa dan idiologi Pancasila.

Prediksi langkah HTI pasca pembubaran di atas tentu dilatarbelakangi oleh doktrin idiologi sang pendiri yakni Taqiyuddin an-Nabhani lewat karyanya al-Takattul al-Hizbiy. Lewat buku tersebut HT tidak akan bergeser apalagi berhenti untuk menentang demokrasi, menyerang legitimasi pemerintahan yang dianggap sekuler, mengajak umat Islam untuk menanggalkan sentimen nasionalisme atau

aliran, dan terus menyerukan khilafah sebagai alternatif. Di antara ujarannya adalah:⁴²

كان على رجال الحزب إذا تعارض الأمرين الجمهور والمبدأ أن يتمسكوا بالمبدأ
ولو تعرضوا لنقمة الأمة، لأنها نقمة مؤقتة. وثباتهم على المبدأ سيعيد لهم ثقة الأمة
وليحذروا من مخالفة المبدأ والحيد عن جوهر قيد شعرة، لأنه هو حياة الحزب
وهو الذي يضمن له البقاء. ولاتقاء مثل هذه المواقف الحرجة، ولدفع مثل هذا
الخطر، على الحزب أن يجتهد في سقي الأمة بمبدئه، والمحافظة على وضوح
أفكار الحزب بمفاهيمه، والعمل على بقاء أجوائها مسيطرة على الأمة
(تقي الدين النبهاني، التكتل الحزبي، منشورات حزب التحرير، 2001، ص 52-53)

Doktrin lain HT yang juga memperkuat perjuangannya adalah doktrin bahwa kembalinya khilafah adalah janji Allah yang pasti akan datang. Hal inilah yang membuat simpatisan HT dengan gigih berjuang dan berdakwah. Doktrin-doktrin tersebut-lah yang membuat HT ketika dilarang tidak hanya berdasar pada pertimbangan taktis gerakan tetapi juga keyakinan teologis bahwa Muslim yang meninggal tidak dalam kondisi berbaiat kepada imam atau khalifah maka ia “mati dalam keadaan jahiliyah”. Menurut keyakinan mereka jika khilafah belum berdiri selama masa hidupnya, yang penting bagi anggota HT adalah hidup sebagai pejuang khilafah dan menolak tunduk pada sistem dan rezim sekuler yang tentu balasannya adalah surga kelak.

Jika memperhatikan berbagai doktrin di atas, maka bisa dipastikan gerakan HTI di Indonesia tidak akan hilang, organisasi boleh bubar, tapi pemikiran memperjuangkan khilafah Islamiyah akan terus dilakukan dengan model gerakan dan “baju” perjuangan yang berbeda.

G. Kesimpulan

Kehadiran HTI di Indonesia merupakan respons atas kegagalan sistem demokrasi Barat yang diterapkan di Indonesia. Transmisi ide HTI di Lampung melalui kontak dan jaringan LDK di sejumlah kampus

⁴² Taqiyuddin an-Nabhani, *al-Takattul al-Hizbiy* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001).

pada tahun 1990-an. HTI di Lampung melakukan ekspansi ke daerah-daerah dengan berbagai pendekatan untuk meraih dukungan dari masyarakat. Meskipun berbagai isu yang diangkat lebih condong ke isu nasional dan global, namun HTI di Lampung memasukkan elemen budaya lokal, atau mengaitkan peristiwa lokal dengan agenda global yang diusungnya. Disamping itu, HTI berupaya menarik masyarakat untuk mendukung perjuangannya dengan cara membingkai isu-isu yang mengesankan bahwa HTI merupakan organisasi yang loyal kepada NKRI dan peduli dengan penderitaan rakyat Indonesia.

Meskipun saat ini ormas HTI telah dibubarkan, namun pergerakan ideologi anggota HTI tidak akan terkubur begitu saja. Ideologi HTI yang tertanam kuat dalam keyakinan anggotanya bisa menjelma lagi dalam bentuk ormas baru sebagai pengganti HTI, atau menjadi partai baru atau beralih haluan berpindah dan bergabung kepada partai berbasis Islam yang sudah ada. Mereka akan mencari partai-partai yang secara ideologi sama atau mirip dengan ideologi HTI sebelumnya, seperti PKS, PPP, PAN dan PBB. Kondisi ini akan terjadi jika mereka gagal memperjuangkan dan mempertahankan ideologinya dalam bentuk ormas. []

DAFTAR PUSTAKA

- al-Nabhani, Taqiyuddin, *At-Takattul Al-Hizbiy*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001.
- . *Pembentukan Partai Politik Islam*. Jakarta: HTI Press, 2007.
- Agus Salim. *The Rise of Hizbut Tahrir Indonesia (1982-2004): Its Political Opportunity Structure, Resource Mobilization, and Collective Action Frames*. Syarif Hidayatullah State Islamic University, 2005.
- Bahtiar Effendy. *Islam and the State in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2003.
- Barr, James. *Fundamentalism*. London: SCM Press, 1981.
- Dwi Hardianto. “Hizbut Tahrir Indonesia: Dakwah Masjid Yang Menggurita.” *Sabili*, 2003, 9:11 edition.
- Elizabeth Fuller Collins. “Dakwah and Democracy: The Significance of Partai Keadilan and Hizbut Tahrir.” Makalah Dipresentasikan Pada Seminar Internasional Tentang Islamic Militant Movements in Southeast Asia. July 22, 2003.
- Fauzan. “Fundamentalisme Dalam Islam.” *Al-Adyan Vol. V*, no. 1 (June 2010): 47–60.
- Greg Fealy. *Hizbut Tahrir in Indonesia: Seeking a “Total” Islamic Identity*. Edited by Shahram Akbarzadeh dan Fethi Mansouri. London and New York: Tauris Academic Studies, 2007.
- Herry Muhammad dan Kholis Bahtiar Bakri. “Khilafah Islamiyah: Ibarat Pelari Maraton.” *Gatra* 30:11, June 10, 2000.
- Hizbut Tahrir. *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*. Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2000.
- Hizbut Tahrir Indonesia. *Mengenal Hizbut Tahrir Indonesia: Partai Politik Islam Ideologis*. Jakarta: HTI, 2004.

- “<http://hizbut-tahrir.or.id/2012/07/04/siaran-Live-Mhti-Lampung-Khilafah-Menjamin-Kebahagiaan-Dan-Kesejahteraan-Keluarga/>,” n.d.
- “<http://hizbut-tahrir.or.id/2012/09/13/siaran-Bulanan-Mhti-Lampung-Dalam-Halo-Lampung-Radar-Tv-Lampung-Kesehatan-Reproduksi-Dalam-Pandangan-Islam/>,” n.d.
- “<http://hizbut-tahrir.or.id/2015/02/27/kunjungan-Hti-Lampung-Ke-Lampung-Post/>,” n.d.
- “<http://hizbut-tahrir.or.id/2015/03/16/siaran-Humas-Hti-Lampung-Menyoal-Isis-Di-Lampung-Tv/>,” n.d.
- “<https://crcs.ugm.ac.id/id/berita-utama/11189/setelah-Hti-Dibubarkan-Konsistensi-Atau-Kompromi.html>,” n.d.
- International Crisis Group. “Radical Islam in Central Asia: Responding to the Threat of Hizbut Tahrir.” ICG Asia Report 58 (June 2003).
- Jamhari et.al. Menuju Khilafah Islamiyah: Gerakan Hizbut Tahrir Di Indonesia”. Edited by Jamhari dan Jajang Jahroni. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- John Lofland and Rodney Stark. ““Becoming a World-Saver: A Theory of Conversion to a Deviant Perspective.” American Sociological Review 30:6 (December 1965).
- Labib, ed. Mengenal Hizbut Tahrir. Depok: Pustaka Thariqul Izzah, 2000.
- Lorne L. Dawson. Who Joins New Religious Movements and Why: Twenty Years of Research and What Have We Learned? Edited by Lorne L. Dawson. USA, UK and Australia: Blackwell Publishing, 2003.
- Martyn Hammersley dan Paul Atkinson. Ethnography: Principles in Practice. London dan New York: Routledge, 2007.
- Peter Mandaville. Global Political Islam. London: Routledge, 2007.
- Suha Taji-Farouki. A Fundamental Quest: Hizb Al-Tahrir and the Search for the Islamic Caliphate. London: Grey Seal, 1996.

Taqiyuddin an-Nabhani. *At-Takattul Al-Hizbiy*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001.

———. *Pembentukan Partai Politik Islam*. Jakarta: HTI Press, 2007.